

**GERAKAN ANTI PERJANJIAN KEAMANAN
JEPANG – AMERIKA
(*NICHIBEI AMPO JŌYAK U HANTAI UNDŌ*)**

**Skripsi Sarjana ini diajukan sebagai
salah satu persyaratan mencapai gelar
Sarjana Sastra**

oleh

INDRA FIRMANSYAH

NIM : 99111075



**JURUSAN SASTRA JEPANG
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS DARMA PERSADA**

JAKARTA

2003

Skripsi Sarjana yang berjudul:

GERAKAN ANTI PERJANJIAN KEAMANAN

JEPANG – AMERIKA

(NICHIBEI AMPO JŌYAKU HANTAI UNDŌ)

Merupakan karya ilmiah yang saya susun di bawah bimbingan Prof. Dr. I Ketut Surajaya, M.A., tidak merupakan jiplakan Skripsi Sarjana atau karya orang lain, sebagian atau seluruhnya, dan isinya sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya sendiri.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya di Jakarta : pada tanggal

Indra Firmansyah

Skripsi Sarjana yang berjudul :

GERAKAN ANTI PERJANJIAN KEAMANAN JEPANG-AMERIKA

(NICHIBEI AMPO JŌYAKU HANTAI UNDO)

Telah diuji dan diterima dengan baik (lulus) pada tanggal 7 bulan Agustus, tahun 2003 di hadapan Panitia Ujian Skripsi Fakultas Sastra.

Pembimbing/Penguji

(Prof. Dr. I Ketut Surajaya, M.A.)

Ketua Panitia/Penguji

(Dra. Tini Priantini)

Penguji

(Syamsul Bahri, S.S)

Sekretaris Panitia/Penguji

(Dra. Yuliasih Ibrahim)

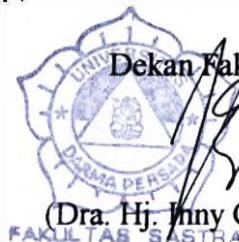
Disahkan oleh :

Ketua Jurusan Sastra Jepang

(Dra. Yuliasih Ibrahim)

Dekan Fakultas Sastra

(Dra. Hj. Inny C. Haryono, M.A.)



KATA PENGANTAR

Syukur *Alhamdulillah* (segala puji kepada Allah, Tuhan semesta alam) hanya dengan rahmat Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi Sarjana ini selesai pada waktunya, untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan studi akhir jenjang pendidikan Strata I, Jurusan Sastra Jepang, Universitas Darma Persada.

Mengenai tema dari Skripsi ini penulis mengambil judul mengenai Perjanjian Keamanan Jepang – AS yang lebih dikenai *Nichibei Ampo Joyaku* dengan permasalahan yang sangat kompleks yaitu di satu sisi perjanjian keamanan tersebut tidak diperbolehkan, dikarenakan hal tersebut melanggar UUD Jepang dan di sisi lainnya Jepang membutuhkannya disebabkan Jepang tidak lagi mempunyai kekuatan militer sesuai dengan Deklarasi Postdam.

Berbagai pandangan mengenai perjanjian ini terus berkembang, ada yang menyatakan perjanjian tersebut merupakan suatu usaha imperialisme AS yang secara terselubung untuk mempersenjatai Jepang sehingga muncul kekhawatiran bahwa Jepang akan kembali menjadi kekuatan yang superior di Asia dengan dukungan dari AS.

Penulis menyadari terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari dorongan dan bantuan dari pihak lain, baik dalam pengarahannya maupun melengkapi materi yang ada. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Ketut Surajaya, M.A., selaku dosen pembimbing.
2. Bapak Syamsul Bahri, S.S., selaku pembaca Skripsi.
3. Ibu Dra. Tini Priantini selaku Panitia Ujian Sidang Skripsi.
4. Ibu Dra. Yuliasih Ibrahim selaku Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Jepang serta selaku Dosen Pembimbing Akademik.

5. Kepada orang tua yang senantiasa membantu dalam hal moral maupun materi.
6. Kepada Dewi dan teman-teman kelas C angkatan '99, serta tidak lupa Christanto, Tila, Hadi, Cahyo dan rekan seperjuangan (Irma, Ruby, Anas).

Jakarta, Juli 2003

Penulis



ABSTRAKSI

Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tahun 1945, maka pemerintahannya diambialih oleh SCAP (*Supreme Commander of Allied Forces*) – dalam hal ini dipegang sepenuhnya oleh AS – yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di Jepang, sehingga segala kebijakan yang diambil terhadap Jepang harus sesuai dengan ketentuan dengan SCAP.

Perang Korea yang terjadi di era tahun 1950-an, dengan semakin sengitnya perang dingin antara AS dan Uni Soviet, menyebabkan AS mulai melakukan kebijakan-kebijakan militerisasi terhadap Jepang dengan harapan bahwa Jepang dapat bertindak sebagai pertahanan melawan kekuatan komunis. Salah satu kebijakan yang diambil oleh AS yaitu penandatanganan Perjanjian Perdamaian (*Hieiwa Joyaku*) dan Perjanjian Keamanan (*Ampo Joyaku*) pada tahun 1951.

Setelah Perjanjian Perdamaian dan Perjanjian Keamanan ditandatangani, Jepang menjadi negara yang merdeka namun didalam perjanjian tersebut, khususnya perjanjian keamanan yang telah diperbaiki pada tahun 1960, telah disepakati bahwa Jepang akan meningkatkan kemampuan pertahanan dalam negerinya dan kedua negara akan bekerja sama dalam bidang militer.

Dalam hal ini, banyak pendapat publik bahwa muncul kekhawatiran Jepang akan ikut terlibat dalam kegiatan militer di Asia, sehingga kelompok cinta perdamaian yang sebagian besar dari kaum ekstrim kiri (Pihak Oposisi) membentuk gerakan anti perjanjian keamanan yang diorganisasikan secara nasional.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Abstraksi.....	vi
Daftar Isi.....	vii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	7
1.3 Tujuan.....	7
1.4 Ruang Lingkup.....	8
1.5 Metode Penulisan.....	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	8
 BAB II ASPEK-ASPEK PEMICU TERJADINYA	
GERAKAN ANTI PERJANJIAN KEAMANAN.....	10
2.1 Sentimen Publik terhadap Penempatan Militer AS di Jepang.....	10
2.2 Kebijakan Kishi di dalam Pemerintahan.....	12
2.3 Perundingan terhadap Pengubahan Perjanjian Keamanan.....	16
2.4 Pembentukan Dewan Rakyat.....	20
 BAB III GERAKAN ANTI PERJANJIAN KEAMANAN	
JEPANG--AMERIKA.....	25
3.1 Insiden Pengajuan Petisi ke Diet (<i>Kokkai Seigan Demo Jiken</i>).....	25

3.2 Insiden Iianeda (<i>Iianeda Jiken</i>).....	29
3.3 Penandatanganan Perjanjian Keamanan.....	32
3.4 Perdebatan di Diet.....	34
3.5 Aksi Pemboikotan Proses Persidangan.....	39
3.6 Aksi Pemogokan dan Demonstrasi.....	42
3.7 Pengesahan Perjanjian Keamanan dan Berhentinya Kishi sebagai Perdana Menteri.....	45
 BAB IV KESIMPULAN.....	 47
 DAFTAR PUSTAKA.....	 50
GLOSARI.....	52
KRONOLOGI.....	54
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kalahnya Jepang dalam Perang Dunia II yang ditandai dengan jatuhnya Bom Atom di Hiroshima dan Nagasaki oleh Sekutu pada bulan Agustus 1945 dan penandatanganan dokumen penyerahan "*Instrument of Surrender*" pada 2 September 1945, menyebabkan pemerintahan Jepang berada di bawah kependudukan SCAP (*Supreme Commander of Allied Powers*). Saat perang berakhir dimulailah pendudukan Sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS) dengan panglima tertinggi penguasa kependudukan berada di tangan Jendral Douglas MacArthur. Tugas pokoknya ialah melaksanakan amanat Deklarasi Postdam yang telah dipertegas dan dirinci dalam pernyataan AS mengenai awal masa kependudukan Sekutu terhadap Jepang yang dimulai pada tanggal 29 Agustus 1945.¹

Untuk menjamin tercapainya amanat Deklarasi Postdam, dilaksanakanlah pendudukan militer (*military occupation*) oleh tentara pendudukan di Pulau-pulau induk Jepang, dan menetapkan kebijakan demokratisasi di segala bidang. SCAP berhak untuk mengambil segala kebijakan yang dianggap perlu. Salah satu kebijakan

¹ Mohamad Sudjiman, "Serba-serbi tentang Jepang dengan ciri-ciri khasnya," (Buku yang tidak diterbitkan, Lingkungan Keluarga Besar Persada dan Unsada serta Pusat Manajemen Mutu Terpadu Indonesia, 1998, p. 250.)

SCAP ialah pelaksanaan Kongres Perdamaian dan penandatanganan Perjanjian Perdamaian (*Hieiwa Joyaku*) dan Perjanjian Keamanan (*Ampo Joyaku*).^{2 i}

Kebijakan tersebut bermula pada saat pecahnya Perang Korea di era tahun 50-an. Pada saat itu, Jepang mengalami krisis sistem keamanan. Berdasarkan Deklarasi Postdam, Jepang tidak lagi mempunyai kekuatan militernya sendiri. Sehingga muncul kekhawatiran akan invasi komunis dari Korea Utara ke Jepang. Menanggapi hal ini, maka Menteri Luar Negeri AS, John Foster Dulles, mengadakan kunjungan ke Jepang menemui Perdana Menteri Jepang, Yoshida Shigeru, untuk membicarakan proses pertahanan dan keamanan serta kemerdekaan Jepang.³

Sesuai dengan kesepakatan bersama antara Jepang dan AS, diadakanlah Kongres Perdamaian di San Francisco. Sebagai hasilnya yaitu penandatanganan perjanjian perdamaian dan perjanjian keamanan pada tanggal 8 September 1951 antara Jepang dengan AS yang dihadiri 48 negara lainnya kecuali Uni Soviet dan RRC.^{4 ii} Perjanjian tersebut mulai efektif pada tanggal 28 April 1952, dengan maksud untuk memelihara perdamaian di Timur Jauh.⁵

² I Ketut Surajaya (edit), "Pengantar Sejarah Jepang 2," (Buku yang tidak diterbitkan, Jakarta, 2001, pp. 164 – 165).

ⁱ Pada Perjanjian Perdamaian San Francisco, Jepang mengakui kemerdekaan Korea dan melepaskan semua hak dan kekuasaannya terhadap Taiwan, Kurile dan daerah selatan Sakhalin. Jepang juga menyetujui bahwa Okinawa, Amami dan Ogasawara dibawah kependudukan AS meskipun Jepang disaat itu sudah merdeka. Pada Perjanjian Keamanan Jepang – AS menyatakan bahwa Jepang memperbolehkan menempatkan basis militer dan tentara AS di Jepang dan pengaturan terhadap sistem keamanan Jepang yang dibantu oleh AS.

³ Murakami Hyoe, *Japan: The Years of Trial* (Tokyo: Kodansha International Ltd, 1982), p. 227

⁴ I Ketut Surajaya, *loc. cit.*

ⁱⁱ Uni Soviet dan RRC seperti yang disebut di atas berpendapat bahwa Perjanjian Perdamaian dan Perjanjian Keamanan tersebut merupakan usaha terselubung AS untuk mempersenjatai Jepang dan melaksanakan imperialisme gaya baru untuk menduduki Jepang setelah merdeka.

⁵ W. G. Beasley, *The Modern History of Japan* (Tokyo: Charles E. Tuttle Company, Inc, 1973), p. 245.

Tindakan ini diambil, dikarenakan Jepang dan AS sadar akan posisi geografis Jepang yang menampilkan dua sistem keamanan kolektif, masing-masing dipimpin oleh AS dan Uni Soviet. Konfrontasi antara mereka membawa gejala pemusatan kekuatan militer yang kuat di Eropa dan di Asia Timur oleh AS maupun Uni Soviet. Jepang menyadari pula keberadaannya dalam kondisi terkepung konsentrasi kekuatan militer Uni Soviet, ditambah dengan RRC dan Korea Utara, yang tentu saja mengkhawatirkan pihak AS. Karena itu Jepang dan AS menganggap perjanjian keamanan tersebut sangat penting.

Perjanjian Keamanan Jepang – AS tersebut mendorong Jepang menjadi negara yang bebas dan merdeka berdaulat, agar bisa menjalankan fungsi strategi militer dan pemerintahannya sendiri. Sehingga kemungkinan masa kependudukan AS akan berakhir.

Mengenai perjanjian keamanan ini segala bentuk isinya bertolak belakang dengan Konstitusi Jepang yang dikenal dengan "*Nihon Koku Kempo*". Pada Pasal IX menyebutkan bahwa Jepang untuk selama-lamanya, sebagai hak berdaulat negara, menolak perang serta ancaman atau penggunaan kekuatan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah.⁶

Selain itu, sebagian isi perjanjian keamanan tersebut Jepang merasa dirugikan. Dalam hal ini, pada Pasal I, Perjanjian Keamanan Jepang – AS, menyebutkan bahwa:

⁶ Mohamad Sudjiman, *loc. cit.*

平和条約及びこの条約の効力発生と同時に、アメリカ合衆国陸軍、空軍及び海軍を日本内及びその附近に配備する権利を、日本国は、許与し、アメリカ合衆国は、これを受諾する。この軍隊は、極東における国際の平和と安全の維持に寄与し、並びに、1又は2以上の外部の国による教唆又は干渉によりに引き起された日本国における大規模の内乱および騒じょうを鎮圧するため日本国政府の明示の要請に応じて与えられる援助を含めて、外部から武力攻撃に対する日本国の安全に寄与するために使用することができる。

Jepang mengabulkan, dan AS menerima, hak di dalam pemberlakuan perjanjian perdamaian dan perjanjian keamanan ini, untuk mengatur pasukan Angkatan Darat, Udara, dan Laut AS di Jepang. Pasukan ini dapat ditugaskan untuk menjaga keutuhan dari perdamaian internasional dan keamanan di Timur Jauh, serta menjaga Jepang dari serangan bersenjata, termasuk bantuan yang diberikan berdasarkan permintaan darurat oleh Pemerintah Jepang untuk meredam kekacauan dan gangguan internal di Jepang, yang menyebabkan adanya hasutan dan campur tangan dari kekuatan luar.⁷

dan pada Pasal II yang menyebutkan :

第1条に掲げる権利が行使される間は、日本国は、アメリカ合衆国の事前の同意なくして、基地、基地における若しくは基地に関する権利、権力若しくは権能、駐兵若しくは演習の権利又は陸軍、空軍、若しくは海軍の通過の権利を第三国に許与しない。

Selama pelaksanaan terhadap hak yang telah dicantumkan pada Pasal I, Jepang tidak akan mengabulkan, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari AS, mengenai pangkalan militer atau hak, kekuatan atau kewenangan atau apapun, yang berhubungan dengan pangkalan militer atau hak dari pasukan garnisun atau manuver, atau penempatan Angkatan Darat, Udara dan Laut kepada negara ke tiga.⁸

Pada isi keseluruhan perjanjian keamanan tersebut bisa ditemui empat faktor yang memberatkan pihak Jepang, yaitu: (1) tidak ada penentuan masa perjanjian itu

⁷ George R. Packard, *Protest in Tokyo: The Security Treaty Crisis of 1960* (New Jersey: Princeton, 1966), p. 356.

⁸ *Ibid.*

berlaku, (2) adanya intervensi militer AS terhadap penanggulangan gangguan internal di Jepang, (3) tidak ada kewajiban bagi AS untuk bersama-sama menjaga pertahanan Jepang.⁹

Mengenai wilayah dan fasilitas penempatan markas militer AS di Jepang. Sedikitnya total wilayah yang dipakai oleh AS untuk penempatan militernya sekitar 113.827 ha (dua per-tiga digunakan untuk latihan manuver).¹⁰

Pemerintah Jepang menyadari bahwa perjanjian tersebut tidak adil, disebabkan kekhawatiran Jepang akan ikut terlibat dalam kegiatan militer AS dan pengambilalihan sarana dan prasarana yang ada di Jepang untuk keperluan militer AS. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan pemerintah Jepang agar menyarankan suatu perbaikan pada perjanjian tersebut serta melakukan perundingan antara kedua negara yang akan dimulai pada tahun 1958.¹¹

Perbaikan dilakukan untuk memperjelas tentang kewajiban angkatan bersenjata AS untuk pertahanan Jepang, antara lain membentuk kerja sama dalam bidang pertahanan dan keamanan dan membatasi jangka waktu perjanjian tersebut selama sepuluh tahun ke depan.¹²

Pengubahan perjanjian tersebut mendapat reaksi protes keras dari Pihak Oposisi yang menginginkan perdamaian dunia. Pada bulan Maret 1959, Partai Sosialis Jepang (PSJ), Partai Komunis Jepang (PKJ), *Shoyo* (Dewan Umum Persatuan Perdagangan

⁹ Jun Eto, *A Nation Reborn: A Short History of Post War Japan* (Tokyo: International Society for Educational Information, Inc, 1974), p. 37.

¹⁰ George R. Packard, *op. cit*, p. 8.

¹¹ Kodansha, *Kodansha Encyclopedia of Japan* (Tokyo: Kodansha Ltd, 1983), 9, pp. 166-167.

¹² *Ibid*.

dan Buruh), dan 134 kelompok lainnya mengorganisir suatu Dewan Rakyat (*Kokumin Kaigi*) untuk membentuk Gerakan Anti Perjanjian Keamanan Jepang – AS secara nasional.¹³

Pada bulan Januari 1960, perjanjian keamanan yang baru telah ditandatangani oleh kedua negara di Washington, sehingga gerakan tersebut dikerahkan di dalam dan di luar Gedung Diet dan pada tanggal 19 Mei 1960. Para anggota dewan Partai Demokrasi Liberal (PDL) dan pembicara Majelis Tinggi maupun Rendah, sebagai pihak yang berkuasa, memerintahkan pihak kepolisian untuk memasuki dan mengamankan Diet agar bisa mengakhiri pemblokiran pemungutan suara oleh Pihak Oposisi (dalam hal ini PSJ). Pada hari berikutnya, PSJ memboikot sidang di Gedung Diet, dikarenakan anggota-anggota dari PDL di Diet menyetujui Perjanjian Keamanan Jepang – AS yang baru.¹⁴

Dewan Rakyat memaksa agar pernyataan tersebut dianggap tidak sah dan melakukan aksi protes. Sekitar tiga ratusan orang berkumpul di luar Gedung Diet. Banyak dari warga sipil yang bukan anggota dari Dewan Rakyat bergabung dalam demonstrasi ini. Pada tanggal 15 Juni 1960, kelompok yang menamakan dirinya *Zengakuren* (Asosiasi Federasi Mahasiswa Seluruh Jepang) datang menuju Gedung Diet yang pada saat itu terjadi aksi kekerasan terhadap aparat keamanan, yang

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

mengakibatkan salah satu mahasiswi, Kamba Michiko, yang berumur 20 tahun tewas.¹⁵

1.2 Pokok Permasalahan

Setelah membaca berbagai buku yang berhubungan dengan Gerakan Anti Perjanjian Keamanan Jepang – AS, penulis merasa tertarik untuk melihat apa yang menjadi latar belakang dan apa motivasi dari Pihak Oposisi untuk melakukan Gerakan Anti Perjanjian Keamanan tersebut secara nasional, pihak-pihak mana sajakah yang terlibat di dalam pergerakan tersebut serta sejauh manakah perubahan perjanjian keamanan yang dilakukan oleh pemerintahan AS dan Jepang.

1.3 Tujuan

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan secara deskriptif dan analisis awal mula gerakan tersebut dan keadaan dan kondisi perpolitikan Jepang pada masa gerakan tersebut terjadi disamping untuk menjawab pertanyaan yang ada pada pokok permasalahan.

¹⁵ Janet E. Hunter (edit.), *Concise Dictionary of Modern Japanese History* (Tokyo: Kodansha International Ltd, 1984), p. 24.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang membatasi isi penulisan ini ada dua dasar yaitu:

1. Ruang lingkup berdasarkan waktu. Waktu yang dibatasi sejak tahun 1951 sampai tahun 1960 yaitu sejak awal penandatanganan Perjanjian Keamanan Jepang – AS di San Francisco hingga pada penandatanganan Perjanjian Keamanan Jepang – AS yang baru di Washington dan proses pengesahan di Tokyo.
2. Ruang lingkup berdasarkan tema yang dibatasi pada apa dan bagaimana Gerakan Anti Perjanjian Keamanan Jepang – AS terjadi.

1.5 Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penggarapan penulisan ini adalah metode kepustakaan. Sifat pembahasannya adalah deskriptif berdasarkan sumber data yang berhubungan langsung atau tidak langsung. Buku bacaan utama yang penulis gunakan adalah *Protest in Tokyo; The Security Treaty Crisis of 1960* merupakan karya dari George R. Packard ditambah bahan pustaka lainnya berupa ensiklopedia, majalah dan buletin.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi dalam empat bab dan beberapa sub bab. Bab-bab tersebut terdiri atas:

Bab pertama : Pendahuluan.

Memuat latar belakang, masalah, tujuan, ruang lingkup, metode penulisan dan sistematika penulisan

Bab ke dua : Aspek-aspek Pemicu Terjadinya Gerakan Anti Perjanjian Keamanan.

Menjelaskan latar belakang Gerakan Anti Perjanjian Keamanan Jepang – AS yang disebabkan oleh sentimen publik Jepang terhadap penempatan tentara AS dan pangkalan militernya, kebijakan Kishi, perundingan terhadap perubahan perjanjian oleh Pihak Konservatif dan pembentukan Dewan Rakyat oleh Pihak Oposisi.

Bab ke tiga : Gerakan Anti Perjanjian Keamanan.

Menjelaskan keadaan atau kondisi perpolitikan Jepang dengan terjadinya perdebatan sengit di Diet mengenai persetujuan perjanjian keamanan yang baru antara Partai Demokrasi Liberal (PDL) dan Pihak Oposisi disusul adanya aksi demonstrasi besar-besaran di luar Gedung Diet.

Bab ke empat: Kesimpulan.

Merupakan kesimpulan dari isi keseluruhan bab yang diuraikan sebelumnya.